

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika kepemimpinan Kota Bukittinggi pada masa reformasi hingga tahun 2010 menunjukkan proses transisi politik yang kompleks. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Bukittinggi mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan yang memberi ruang lebih luas bagi aktor lokal untuk berperan dalam politik. Kondisi ini mendorong munculnya elite baru dari kalangan birokrat dan tokoh masyarakat yang ikut bersaing dalam arena politik daerah. Ismet Amzis menjadi figur penting yang merepresentasikan peralihan dari birokrasi menuju kepemimpinan politik di tingkat kota.

Benih jiwa kepemimpinan Ismet Amzis sudah ada sejak masa pendidikannya. Organisasi pertama yang diikuti oleh Ismet Amzis adalah OSIS saat sekolah di SMP dan berlanjut hingga sampai ke SMA Negeri 2 Bukittinggi, sebuah institusi yang dikenal melahirkan banyak tokoh daerah Sumatera Barat, dan kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hingga meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1983. Pengalaman akademis tersebut membentuk kesadaran hukum dan tata kelola pemerintahan yang kelak menjadi landasan kepemimpinan Ismet Amzis. Setelah memasuki dunia birokrasi, keterlibatan Ismet Amzis dalam berbagai organisasi semakin memperluas kapasitas kepemimpinannya. Ismet Amzis tercatat aktif sebagai Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi (1985–1990). Keterlibatan dalam lembaga adat menunjukkan kepedulian Ismet Amzis

terhadap nilai-nilai kultural Minangkabau, sementara perannya di Korpri mencerminkan kemampuannya membangun jejaring di lingkungan birokrasi provinsi. Rekam jejak organisasi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Ismet Amzis bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang pembentukan karakter dan pengalaman organisasi di berbagai tingkatan.

Ismet Amzis, yang sebelumnya berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara, berhasil memperoleh legitimasi politik melalui Partai Demokrat dan kemudian terpilih sebagai Wakil Walikota Bukittinggi periode 2005–2010 mendampingi Djufri. Keberhasilan tersebut menandai munculnya pola baru dalam kepemimpinan lokal figur dengan latar belakang birokrasi kini dapat bertransformasi menjadi aktor politik melalui jalur demokratis. Setelah masa tersebut, Ismet Amzis mencalonkan diri sebagai Walikota Bukittinggi pada tahun 2010 dan memenangkan pemilihan bersama Harma Zaldi sebagai wakilnya.

Untuk dapat menyimpulkan bahwa terdapat pola baru dalam kepemimpinan Bukittinggi masa Ismet Amzis, perlu dilakukan perbandingan dengan kepemimpinan pendahulunya, yakni Djufri. Djufri, yang menjabat sebagai Walikota Bukittinggi pada periode 2000–2009, merupakan birokrat yang membangun karier melalui jalur struktural pemerintahan. Pola kepemimpinan Djufri lebih mencerminkan model lama, yakni mobilitas vertikal dalam hierarki birokrasi yang ditopang oleh jaringan kelembagaan negara. Sementara itu, Ismet Amzis menghadirkan model yang berbeda meskipun berangkat dari birokrasi, Ismet Amzis kemudian menempuh jalur partai politik dan pemilihan langsung untuk merebut kepercayaan publik. Pola baru yang tercipta pada masa Ismet

Amzis adalah lahirnya figur pemimpin yang bukan sekadar produk mutasi jabatan birokrasi, melainkan hasil dari kontestasi demokratis yang menuntut kemampuan komunikasi politik, pembangunan koalisi, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Capaian patut dicatat adalah keberhasilan mempertahankan identitas Bukittinggi sebagai kota wisata, pendidikan, dan budaya. Di bawah kepemimpinan Ismet Amzis, dilakukan berbagai upaya revitalisasi kawasan wisata seperti Jam Gadang dan peningkatan infrastruktur publik yang mendukung ekonomi kreatif masyarakat. Selain itu, peningkatan kinerja aparatur, transparansi anggaran, dan stabilitas politik lokal menjadi bagian dari pencapaian administratif yang diakui secara regional. Namun, pemerintahan Ismet Amzis juga tidak terlepas dari berbagai kritik dan evaluasi. Beberapa kebijakan dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat, terutama di sektor kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, kepemimpinan Ismet Amzis dapat dipandang sebagai babak baru dalam sejarah pemerintahan Kota Bukittinggi sebuah masa transisi dari dominasi birokrasi struktural menuju kepemimpinan yang lahir dari proses demokratisasi, dengan segala dinamika, capaian, dan keterbatasannya.